

**DAMPAK OPTIMALISASI DANA DESA BAGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI PADA DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO)**

Oleh :

**DELIA KAMBA
E1121070**

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

DAMPAK OPTIMALISASI DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO)

OLEH :

DELIA KAMBA

E1121070

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dan
Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo,2023

Pembimbing I



Melinda Ibrahim SE., MSA
NIDN: 0920058601

Pembimbing II



Marina Paramitha S. Piola, SE.,M.Ak
NIDN : 0907039101

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

DAMPAK OPTIMALISASI DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO)

OLEH :

DELIA KAMBA
E1121070

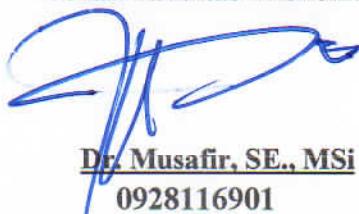
Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Bala Bakri, SE, S.Psi, S.IP., M.Si
(Ketua Penguji)
2. Rahma Rizal, SE.AK., M.Si
(Anggota Penguji)
3. Agustin Bagu, SE., MSA
(Anggota Penguji)
4. Melinda Ibrahim SE., MSA
(Pembimbing Utama)
5. Marina Paramitha S. Piola, SE.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping)

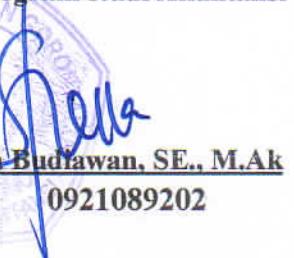
:
:
:
:
:

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Musafir, SE., MSi
0928116901

Ketua Program studi Akuntansi


Sheila Budiawan, SE., M.Ak
0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo,

2023

Yang membuat pernyataan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Pantang dalam menyerah, pantang dalam orang yang enggan berhasil. “Dan
Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Tiada Berputus
Dari Rahmat Allah Melainkan Orang-Orang Kafir.”

(QS Al-Baqarah: 155-156)

“lebih baik gunakan waktu dan energy untuk melakukan sesuatu yang berguna
daripada terus-terusan menunggu seseorang untuk menolongmu.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya dan kakaku tersayang.
Ayah Djoni Kamba dan Ibu Taki Iya Kamba, yang telah senantiasa memberikan
motivasi, kenyamanan, ketenangan serta doa terbaiknya, sehingga saya bisa
menyelesaikan studi ini. Kalian sangat berarti bagi saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini yang berjudul “Dampak Optimalisasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Olele Kabupaten Bone Bolango)” dengan baik dan lancar. Usulan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Ichsan Gorontalo.

Selama penyusunan proposal ini, penulis telah mendapat banyak bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.Abd Gaffar La Tjokke, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr.Musafir,SE., M.Si, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi, Ibu Sella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Melinda Ibrahim, SE.,MSA selaku Pembimbing I, yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis selama mengerjakan penelitian ini, Ibu Marina Paramitha S. Piola, SE., M.Ak selaku Pembimbing II dan telah banyak membantu penulis serta mengarahkan selama mengerjakan penelitian ini, Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi yang telah membimbing penulis selama ini.

Serta Secara Khusus Penulis Menyampaikan Ucapan terima Kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua serta kakak tercinta yang telah mencerahkan segenap kasih sayang, Tenaga, Pikiran dan yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Teman-teman Akuntansi seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dorongan agar cepat-cepat menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala doa dan bantuan akan bernilai ibadah disisi-nya dan selalu diridhoi oleh Allah SWT.

Billahitaufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gorontalo 2023

Delia Kamba

ABSTRAK

DELIA KAMBA. E1121070. DAMPAK OPTIMALISASI DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak optimalisasi peggunaan alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat di desa Olele Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi, mereduksi data, keabshan data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dampak optimalisasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh kesimpulan bahwa: (1) Bina manusia merupakan program tahunan yang dilaksanakan dalam naungan bidang pembinaan kemasyarakatan. Misalnya kegiatan pembinaan organisasi perempuan. yaitu kegiatan khusus untuk PKK yang fokus untuk membina anggota masyarakat untuk lebih berdaya.(2) Bina Usaha. Bina Usaha merupakan program-program yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat olele. misalnya program pembinaan kelembagaan masyarakat, ini termasuk menyediakan inseminator atau pengawas untuk ternak sapi. (3) Bina Lingkungan. Di Desa olele terdapat program-program yang berkaitan dengan perlindungan maupun pelestarian lingkungan. Misalnya seperti memperkenalkan sistem pengelolaan sampah terpadu, penghijauan desa dengan program penanaman pohon. (4) Bina kelembagaan. Di desa olele terdapat program-program untuk peningkatakan kapasitas aparatur desa. program ini menjadi hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ada juga program pengelolaan Lembaga-lembaga UMKM, khususnya yang produknya bisa dipasarkan hingga keluar desa ini butuh pembinaan, bagaimana bisa meluaskan pemasarannya.

Kata kunci: optimalisasi dana desa, pemberdayaan masyarakat



ABSTRACT

DELIA KAMBA. E1121070. THE IMPACT OF OPTIMIZING VILLAGE FUNDS ON COMMUNITY EMPOWERMENT (A STUDY AT OLELE VILLAGE, BONE BOLANGO DISTRICT)

This study aims to find and analyze the impact of optimizing the use of village fund allocations for community empowerment in Olele Village, Kabila Bone Subdistrict, and Bone Bolango District. The research method used in this study is descriptive using qualitative data types. The data collection is done through observation, interviews, and documentation. The data analysis is conducted by collecting all information, reducing data, validating data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the impact of optimizing village funds for community empowerment covers: (1) Human development is an annual program carried out under the auspices of the community development sector. For example, the activities of fostering women's organizations, namely, special activities for Family Welfare Empowerment which focus on fostering community members to be more empowered. (2) Business Development, which is a program aimed at helping the economy of the Olele community. For example, the community institutional development program, which includes providing inseminators or supervisors for cattle. (3) Environmental Development, in which in Olele Village, there are programs related to environmental protection and preservation, for example, introducing an integrated waste management system and greening the village with a tree planting program. (4) Institutional development in which in all villages, there are programs to increase the capacity of village officials. The programs need to be developed for improving the quality of services to the community. In addition, there are also management programs for MSME institutions, especially those whose products can be marketed outside the village, which need guidance on how to expand their marketing.

Keywords: village funds optimization, community empowerment



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Desa	9
2.1.1.1 Penataan Desa	10
2.1.1.2 Kewenangan Desa	12
2.1.1.3 Struktur Organisasi, Tugas & Fungsi Pemerintah Desa....	12
2.1.1.4 Hak dan Kewajiban Desa & Masyarakat Desa	12
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.1.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.1.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	16

2.1.2.3 Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.1.2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.1.2.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	21
2.1.2.6 Dimensi Pemberdayaan Masyarakat	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	26

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	28
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan.....	28
3.3 Operasional Variabel.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Informan Penelitian	33
3.7 Metode Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat.....	36
4.1.1 Kondisi Umum Desa (Geografis & Demografi)	38
4.1.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	39
4.2 Hasil Penelitian	45
4.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Manusia.....	47
4.2.2 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Usaha	49
4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Lingkungan	50
4.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Kelembagaan	53
4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Bina Manusia.....	56
4.3.2 Bina Usaha	59
4.3.3 Bina Lingkungan	64
4.3.4 Bina Kelembagaan	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	71
---------------------	----

5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

2.1 Peruntukan Lahan	40
2.2 Pertumbuhan Penduduk	40
3.1 Operasional Variabel	30
3.2 Daftar Informan Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	27
2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Olele 2019-2020.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara Bersama Kepala Desa Olele	76
Gambar 1.2 Wawancara bersama Kepala Kaur Perencanaan Kantor Desa Olele	76
Gambar 1.3 Wawancara Dengan Sekretaris Desa Olele.....	77
Gambar 1.4 Dokumentasi Bersama Kepala Keuangan Desa Olele	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terenda.

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); sementara alokasi dana tersebut sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelolah dirinya sendiri yang disebut dengan selfgoverning community. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam

masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi (Baura & Mandey, 2014).

Gagasan otonomi desa dilandaskan pada prinsip good governance berpedoman terhadap asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai masyarakat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dari aspek dana desa, terdapat di dalamnya adalah proses pengelolaan aset Sumber Daya Alam (SDM) dan elemen lainnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Proses pengelolaan dana desa berfokus penguatan basis ekonomi masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa merupakan proses menuju kemandirian. Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kata kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut (Indriyanto, 2020).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan

perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Rahayu, 2019).

Dari aspek dana desa, terdapat didalamnya adalah proses pengelolaan aset Sumber Daya Alam (SDM) dan elemen lainnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Proses pengelolaan dana desa berfokus penguatan basis ekonomi masyarakat. Sehingga ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan aset desa merupakan proses penuju kemandirian. Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kata kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut. desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politik memiliki otonomi kewenangan dalam mengatur dan mengurus wilayah beserta isinya (Fadlillah & Kushandajani, 2019).

Pemanfaatan dana desa yang optimal dan program pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan daerah pedesaan di beberapa negara (Tehupuring & Yunita, 2021). Dampak tersebut antara lain peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, perbaikan infrastruktur, peningkatan peluang ekonomi bagi penduduk lokal, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemanfaatan dana desa dan program pemberdayaan masyarakat secara optimal dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk wilayah

pedesaan.

Selain itu, pelaksanaan program-program tersebut juga dapat meningkatkan kohesi sosial dan pemberdayaan masyarakat karena mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat terhadap pembangunan.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelolah dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolah dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya (Asyiroh, 2017).

Menurut Sumaryo (2013) Masyarakat melalui pemberdayaan diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan yang ada di sekitarnya maupun juga berdampak pada kepentingan atau kebutuhan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Berdasarkan

definisi mengenai pemberdayaan masyarakat ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, menurut Pearson, et al dalam Mardikanto dan Soebito (2019) Program pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa diperlukan juga upaya penguatan kapasitas dan kemandirian desa dan kelurahan, Pemerintah Daerah diharapkan lebih memiliki komitmen dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan mendorong prakarsa dan membangun basis sosial ekonomi ditingkat lokal sekaligus menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan swadaya gotong-royong dalam pengelolaan pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelestarian sekaligus pengendalian pembangunan (Akbar et al., 2021)

Menurut Mardikanto Mardikanto dan Soebito (2019), upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah (1) Bina manusia Yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas; (2) Bina usaha. Bina Usaha adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah disertakan partisipasi aktif masyarakat untuk menunjang prasarana/sarana dan kemudahan-kemudahan lain yang menunjang peningkatan usaha masyarakat dalam lingkungan yang sudah

terbina. Singkatnya bina usaha diartikan juga bangunan bisnis; (3) Bina lingkungan. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan agar dapat terjaga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan lebih efektif; (4) Bina kelembagaan. Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya penting dalam menguatkan peran-peran masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan dalam upaya mensejahteraan masyarakat. Bina kelembagaan ditandai dengan aktifnya peran Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Tim Pelaksana Program Desa Percontohan, PKK, RT, RW dan lembaga serta organisasi lainnya yang ada di Desa. Setiap kelembagaan mempunyai peran penting dalam bahu membahu untuk menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu dalam menyelesaikan permasalahan serta pendapat tentang bagaimana program dapat berjalan dengan baik dan juga dari mana sumber biayanya harus dipertimbangkan dengan jelas.

Fenomena yang ditemukan dalam memberdayakan masyarakat Desa di Desa Olele Kecamatan Bone Bolango masih belum dilakukan secara maksimal. Tata kelolah dana Anggaran Dana Desa masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada salah satu mekanisme program dibidang ekonomi yang belum memperlihatkan bentuk perencanaan yang efektif, karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga-lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah terhadap program yang direncanakan. Hal ini karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran. Adapun salah satu program pemberdayaan masyarakat yang belum efektif adalah program bina usaha. Program bina usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan perbaikan

kesejahteraan masyarakat dan peningkatan potensi lokal.

Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Jamaluddin et al. (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak berdampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa akibat tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini disebabkan desa memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan rencana programnya namun belum optimal dalam realisasinya.

Hal ini membutuhkan kajian lebih mendalam mengingat optimalisasi dana desa dan program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan banyak manfaat bagi daerah perdesaan, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar, peningkatan peluang ekonomi bagi penduduk setempat, peningkatan kohesi sosial dan pemberdayaan dalam masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk perdesaan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti tentang “Dampak Optimalisasi Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Olele Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Dampak Optimalisasi Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Olele Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diuraikan di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang Optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Olele

Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dampak optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Olele Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada Akuntansi Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para aparatur desa dalam mengelola dan menggunakan alokasi dana desa agar bisa memaksimalkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti alokasi dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Desa

Prespektif etimologis, bersumber dari Sansekerta yaitu deca, yang berarti rumah, kampung halaman, atau tempat kelahiran. Dari sudut pandang geografis, desa didefinisikan sebagai "sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan yang lebih kecil dari kota". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh pemerintah pusat dan berwenang mengurus rumah tangga berdasarkan asal usul dan adat istiadat di Daerah Kabupaten. Menurut Widjaja (2003), pengertian desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan susunannya sendiri berdasarkan asal usul yang khusus. Dasar pemikiran penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. "

Menurut UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dikatakan bahwa pengertian desa adalah sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa biasa atau apapun sebutannya dengan nama lain. selanjutnya disebut desa, merupakan badan hukum masyarakat, memiliki batas wilayah, mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui. dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara serta dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa adalah komunitas mandiri, komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Memahami bahwa desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah, maka kedudukan desa dengan otonomi sejati sangat strategis. Dari otonomi daerah. Hal ini karena kuatnya otonomi desa berdampak besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Pasal 6-5 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, desa dikatakan berada dalam wilayah kekuasaan bupati/kota. Desa ini terdiri dari pemukiman dan desa adat.

2.1.1.1 Penataan Desa

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kesepakatan tersebut didasarkan pada hasil penilaian status pembangunan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia dan Pasal 7 Desa serta

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa pada pasal 7 menyebutkan bahwa Penataan Desa tersebut meliputi:

a. Pembentukan

Menurut undang-undang Republik Indonesia, Pasal 8 Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembentukan desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Batas usia desa induk minimal 5 tahun pada saat pendirian.
- b) Jumlah penduduk yaitu: 1) Wilayah Jawa adalah kepala keluarga paling sedikit 6.000 (6000) atau 1.200 (1200). 2) Daerah Bali memiliki keluarga minimal 5.000 (5.000) atau 1.000 (1000). 3) Wilayah Sumatera memiliki keluarga minimal 4.000 (4.000) atau 800 (800). 4) Daerah Sulawesi

Selatan dan Sulawesi Utara adalah kepala keluarga sekurang-kurangnya 3.000 (3000) atau 600 (600). 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat adalah kepala keluarga minimal 2.500 (2500) atau 500 (500). 6) Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan memiliki keluarga minimal 2.000 (2.000) atau 400 (400). 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara memiliki keluarga minimal 1.500 (1.500) atau 300 (300). 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Marc dan Maluku Utara adalah kepala keluarga minimal 1.000 (1.000) atau 200 (200). Dan wilayah Papua dan Papua Barat adalah kepala keluarga minimal 500 (500) atau 100 (100).

- c) Wilayah kerja dengan akses transportasi antar daerah.
 - d) Sosial budaya dapat menciptakan keharmonisan sosial menurut adat desa
 - e) Berpotensi mendukung SDA, SDM, dan SDE.
 - f) Peta sesuai dengan peraturan pemerintah merupakan batas desa.
 - g) Tersedianya modal kerja, obligasi, dan tunjangan lainnya bagi aparatur pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penghapusan diatur dalam pasal 9 UU RI No.6 Tahun 2014. Apabila terjadi bencana atau program strategis nasional.
 - c. Penggabungan diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia, dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan, dua atau lebih desa yang berdekatan akan diintegrasikan ke dalam desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. menyatakan bahwa hal itu dapat dilakukan. Secara hukum.

- d. Perubahan status. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa, desa dapat berubah status menjadi kuasi-distrik melalui musyawarah desa.
- e. Penetapan Desa sesuai UU No. 6 RI, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengubah status Kerlahan menjadi Desa atas prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana mestinya.

2.1.1.2 Kewenangan Desa

Dalam Pasal 18 UU RI No. 6 Tahun 2014 kewenangan desa meliputi kewenangan yang didasarkan pada pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentang inisiatif, asal usul, dan praktik komunitas. Desa.

2.1.1.4 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa menyatakan: “Pemerintah desa disebut wali desa, atau nama lain yang mendukung perangkat desa sebagai unsur dalam pengelolaan desa.” Dalam Permendagri diatur bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa, Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

2.1.1.4 Hak dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa

1. Menurut undang-undang Republik Indonesia, Pasal 67 Desa Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa hak dan kewajiban desa adalah sebagai berikut: Desa memiliki hak sebagai berikut: a) Berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang mengatur dan mengurus

- kepentingan masyarakat. b) Mendirikan dan mengelola lembaga desa. c) Mendapatkan sumber penghasilan
2. Desa berkewajiban: Melindungi dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa c. Pengembangan kehidupan demokrasi d. Mengembangkan pemberdayaan bagi masyarakat desa Olele. Melayani dan memajukan masyarakat desa

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa dinyatakan sebagai berikut. Pemenuhan hak dan kewajiban desa. “Semua kegiatan termasuk perencanaan keuangan desa, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.”

2.1.2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 4 menyebutkan bahwa:

1. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

a. Sekretaris Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan dalam Pasal 5 bahwa sekretaris desa bertindak sebagai koordinator penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Selain itu, Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- 2) Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

a. Kepala Seksi. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 6 menyebutkan bahwa kepala departemen bertindak sebagai pelaksana

kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala departemen memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

b. Bendahara

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa bendahara diurus oleh pegawai bagian keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menahan, menyetor atau membayar, mengurus dan bertanggung jawab menghasilkan pendapatan desa dan membelanjakan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan anggaran desa.

2.1.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 8 menyebutkan bahwa APBDesa, terdiri atas:

1. Pendapatan Desa. Pendapatan desa meliputi semua uang yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak boleh dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari kelompok-kelompok berikut:
 - a). Pendapatan Awal Desa (PADesa). Kelompok PADesa terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut: 1) Hasil Usaha 2) Hasil Aset 3) Swadaya, Partisipasi dan gotong royong 4) Pendapatan awal lainnya dari desa.
 - b). Transfer: Kelompok transfer terdiri dari jenis sebagai berikut: 1) Dana Desa 2) Porsi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
 - c). Penghasilan lainnya. Kelompok pendapatan lainnya terdiri dari jenis berikut: 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, yang bersifat opsional 2) Pendapatan desa lain yang sah
2. Belanja Desa. Pengeluaran desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran, yang tidak akan diganti oleh desa. Belanja desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan desa. Pengelompokan belanja desa terdiri atas kelompok-kelompok sebagai berikut: a. Penyelenggaraan pemerintahan desa b. Pelaksanaan pembangunan pedesaan c. Pembangunan masyarakat pedesaan d. pemberdayaan masyarakat desa e. Belanja tak terduga

Pengelompokan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa yang dituangkan dalam RKPDDesa. Acara terdiri dari jenis pembelian berikut:

- 1) Pegawai. Jenis biaya pegawai dianggarkan untuk biaya pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan bagi BPD. Biaya staf dianggarkan di bawah Administrasi Pemerintah Pedesaan, Kegiatan Pendapatan Tetap dan Manfaat. Biaya staf pelaksana dibayar setiap bulan.
 - 2) Barang dan Jasa. Beban barang dan jasa digunakan untuk beban perolehan/perolehan barang yang masa manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 3) Belanja Modal. Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/perolehan barang atau bangunan yang nilainya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/perolehan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan perangkat desa.
3. Pembiayaan Desa. Pendanaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan dikembalikan, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- Pembiayaan desa terdiri dari kelompok-kelompok sebagai berikut:
- a. sebuah. Tanda terima pembiayaan. Penerimaan dana meliputi: 1) Lebih dari perkiraan anggaran (SiLPA) untuk tahun SiLPA sebelumnya antara lain, kelebihan pendapatan atas pengeluaran, penghematan biaya dan sisa dana untuk kegiatan tindak lanjut. 2) Pembayaran dana cadangan Pembayaran dana cadangan digunakan dalam anggaran untuk

mentransfer dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa pada tahun anggaran yang bersangkutan. 3) Hasil dari penjualan properti desa yang terisolasi. Hasil dari penjualan properti desa terpencil digunakan untuk mentransfer pendapatan anggaran dari penjualan properti desa terpencil.

- b. Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 1) Pembentukan Dana Cadangan. 2) Penyertaan Modal Desa.

2.1.2.3 Dimensi Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan.
 - a. Sekretaris desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa untuk APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun masing-masing.
 - b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada kepala APBDesa desa.
 - c. Rancangan peraturan tentang anggaran desa diajukan oleh kepala desa kepada dewan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - d. Rancangan Peraturan tentang anggaran penyelesaian disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - e. Rancangan peraturan anggaran permukiman yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala permukiman kepada bupati/walikota melalui Kamat atau pejabat lain yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujuinya evaluasi.

2. Penganggaran

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri dilakukan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan Pelaporan Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan pendanaan.
- c. Pelaporan pelaporan pelaksanaan APBDesa diatur dengan Peraturan Desa.
- d. Perdes tentang laporan pelaporan pelaksanaan APBDesa dilampirkan:
 - 1) Bentuk Laporan pelaksanaan anggaran desa untuk tahun anggaran pelaporan sebagian;
 - 2) Format laporan kekayaan yang dimiliki desa per 31 Desember tahun anggaran berkaitan dengan format laporan program pemerintah dan0kol-p pemerintah daerah yang diterima desa.
 - 3) Kepemimpinan dan pengawasan. a) Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasi dan mengawasi penyediaan dan penyaluran Dana Desa, peruntukan Dana Desa, serta penyaluran penerimaan pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa. b.

Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk mendorong dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa inggrisnya “empowerment” terjemahan secara harfianya yaitu “ pemberkuasaan” atau juga “pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Robert Chambers sebagimana diikuti oleh Kartasasmita (1996:142), pemberdayaan (empowerment) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan “*people centered participatory, empowering and sustainable*”. Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan peranan negara dan pemerintah pada posisi yang sentral dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan/atau upaya penyempuranaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

2.1.2.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sumaryadi (2005:25), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusia yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marginal, dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Adisasmita (2006), mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi), (b) aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dan (c) aspek keluaran (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 7, menyebutkan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

Dijelaskan pula oleh Mubyarto (1996) bahwa pemberdayaan ditekankan pada pemberdayaan manusia yang diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia terutama pada masyarakat desa, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peningkatan

kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan seni IPTEK, sehingga seiring perkembangan IPTEK penguasaan teknologi informasi dan komunikasi metlak harus menjadi pelatihan (Mardikanto dan Soebianto, 2019). Melalui perkembangan teknologi tersebut dampak pemberdayaan teknologi menjadi jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera (R. Wrihartnolo dan Dwidjowijoto, 2007:149). Menyikapi pernyataan tersebut bahwa pemberdayaan berbicara mengenai penciptaan peluang yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga Riniwati (2011:2) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan otonomi dan pengambilan keputusan lebih besar kepada pekerja dalam segala faktor yang mempengaruhi hasil kerja.

Bersumber dari penjelasan para ahli mengenai arti dan makna pemberdayaan yang memiliki pandangan masing-masing. Keseluruhan makna dan arti tersebut memiliki arah yang sama untuk dapat memandang pemberdayaan sebagai sebuah pembelajaran agar lebih berdaya guna. Menyentuh hal tersebut pemberdayaan dapat dilihat melalui prinsip-prinsip serta ruang lingkup kegiatan pemberdayaan.

2.1.2.5 Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebiato (2019) merupakan proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun daya dalam artian kekuasaan atau posisi

tawar. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dirumuskan 3 upaya pokok dalam setiap pemberdayaan yang disebut Tri Bina, dimana hal tersebut meliputi Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.

Lebih lanjut, dari ke 3 upaya pokok tersebut dikembangkan oleh Mardikanto dan Soebiato (2019) menjadi 4 upaya pokok yang meliputi :

- 1) Bina Manusia: Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Bina manusia meliputi upaya penguatan atau pengembangan kapasitas individunya serta pengembangan kapasitas sistem jejaring untuk memperluas jaringan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran
- 2) Bina Usaha: Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Bina usaha mencakup pemilihan komoditas dan juga suatu usaha untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di desa, dengan cara perencanaan dan pengembangan usaha masyarakat dengan memprakarsai pembentukan suatu badan usaha sebagai penanggungjawab dan juga sebagai manajemen bisnis bagi masyarakat agar dapat berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat
- 3) Bina Lingkungan : Bina Lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Suatu upaya dalam memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan cara memaksimalkan potensi lokal Desa untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga memberikan kesadaran masyarakat untuk

pelestarian lingkungan. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan lebih efektif.

- 4) Bina Kelembagaan : Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya penting dalam menguatkan peran-peran masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan dalam upaya mensejahteraan masyarakat.

Bina kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan. Sebagai suatu hal yang disetujui dan memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen seperti, 1) Komponen person, 2) Komponen kepentingan, 3) komponen aturan, dan 4) Komponen Struktur. Bina kelembagaan ditandai dengan aktifnya peran Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Tim Pelaksana Program Desa. Setiap kelembagaan mempunyai peran penting dalam bahu membahu untuk menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu dalam menyelesaikan permasalahan serta pendapat tentang bagaimana program dapat berjalan dengan baik dan juga dari mana sumber biayanya harus dipertimbangkan dengan jelas. Keberhasilan dari bina mansia, bina usaha, dan bina lingkungan dipengaruhi oleh ketersediaan dan peran penting dari kelembagaan yang telah bersinergi secara optimal.

2.1.2.6 Penelitian Terdahulu

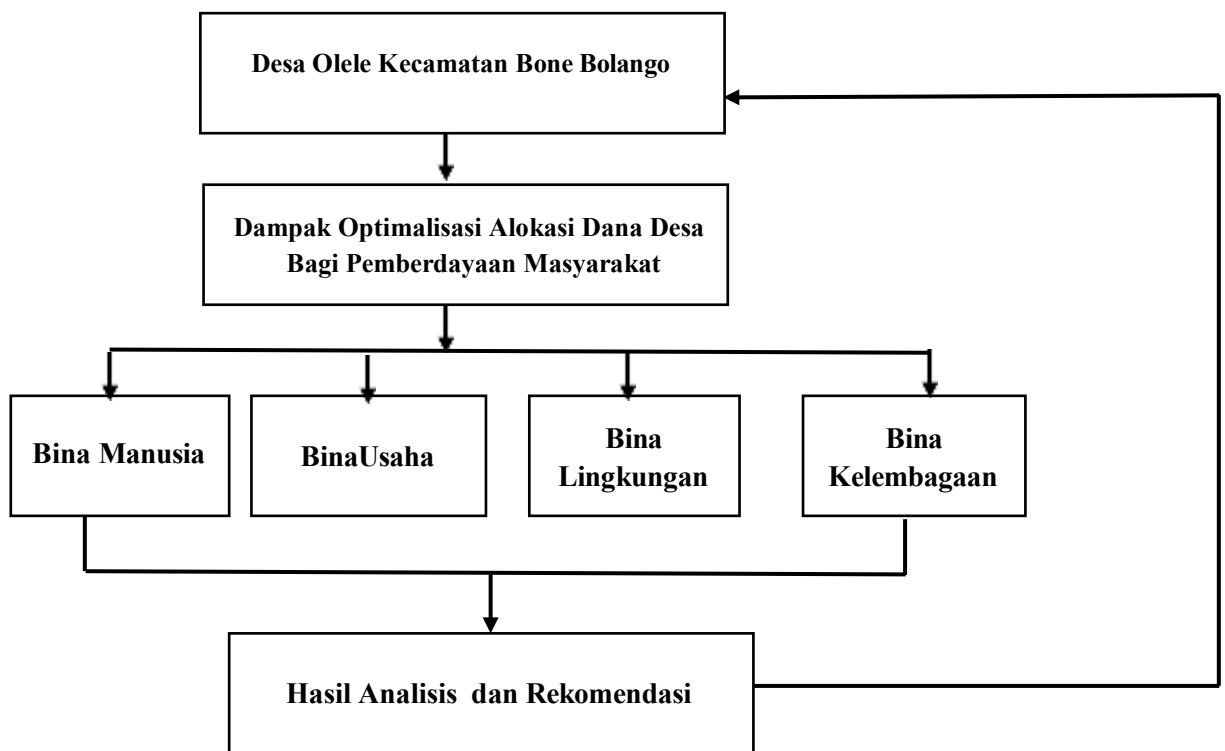
Dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Indrayanto dan Rosidana (2020) dengan Judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Percontohan (Studi Pada Desa Duduk ampeyan Kabupaten Gresik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Percontohan di Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan terdiri dari 4 variabel yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan sudah berjalan dengan baik.
2. Fadlillah (2017) Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijakska Kabupaten Pati Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang dan Apa saja faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Digital di Kampung Wisata Talun Kacang, Desa Kandri, Kota Semarang. Hasil penelitian bahwa Dana desa membawa manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Margorejo. terbukti dengan adanya peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bidang pertanian adalah salah satu contoh yang paling signifikan keberhasilannya, sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijakska Kabupaten Pati.

3. Julika dan Irawati (2016) dengan judul Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemberdayaan KIM dalam mendorong pembangunan desa berdasarkan atas empat (4) kegiatan pemberdayaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep melalui empat (4) kegiatan pemberdayaan yang meliputi bina manusia berkaitan dengan keanggotaan KIM serta bentuk hubungan jejaring KIM. Selain itu melalui bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kegiatan tersebut bersumber dari Permendagri No. 08 tahun 2008 yang mengemukakan materi pemberdayaan KIM haruslah berkaitan dengan pengembangan SDM, manajemen, aktifitas KIM serta kelembagaan. Penerapan kegiatan tersebut direalisasikan melalui workshop, pembinaan, sosialisasi serta pameran KIM.

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk menggambarkannya dalam diagram kotak sebagai bentuk jalan pikiran peneliti, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka yang menjadi objek penelitian adalah Dampak Optimalisasi Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Ruslan (2003:24), Metodologi adalah kegiatan ilmiah yang membahas tentang cara (sistematis) bekerja untuk memahami suatu objek atau objek kajian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan juga dapat dibuktikan kebenarannya.

Menurut Hamidi (2007:6), penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan karena dapat digunakan baik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia maupun untuk memajukan ilmu pengetahuan.

Menurut Sugiono (2012) Ada banyak jenis penelitian, seperti penelitian kuantitatif, penelitian yang dilakukan dengan memperoleh statistik berupa angka-angka atau data kualitatif. Sedangkan data berupa pencarian kualitatif istilah, skema dan gambar.

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu objek ilmiah yang dipertanggung jawabkan dengan suatu tujuan tertentu.

3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Kualitatif

yaitu Penelitian dengan menggunakan informan sebagai alat pengumpulan data

pokok dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dampak Optimalisasi Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pendapat masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. (Sukmadianata 2006:6)

3.2.1 Operasional Variabel

Demi memperjelas data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, maka terlebih dahulu harus mengoperasionalkan variabel-variabel dari latar belakang penelitian dalam kerangka pemikiran dengan tujuan untuk menentukan acuan wawancara dari respondennya yang bersangkutan.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Pemberdayaan Masyarakat	Bina Manusia	Bina manusia meliputi upaya penguatan atau pengembangan kapasitas individunya serta pengembangan kapasitas sistem jejaring untuk memperluas jaringan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
	Bina Usaha	Bina Usaha : Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Bina usaha mencakup pemilihan komoditas dan juga suatu usaha untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di desa, dengan cara perencanaan dan pengembangan usaha masyarakat dengan memprakarsai pembentukan suatu badan usaha sebagai penanggungjawab dan juga sebagai manajemen bisnis bagi masyarakat agar dapat berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat

	Bina Lingkungan	Suatu upaya dalam memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan cara memaksimalkan potensi lokal Desa untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga memberikan kesadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan lebih efektif.
	Bina Kelembagaan	Suatu upaya penting dalam menguatkan peran-peran masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan. Bina kelembagaan ditandai dengan aktifnya peran Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Tim Pelaksana Program Desa. Setiap kelembagaan mempunyai peran penting dalam bahu membahu untuk menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu dalam menyelesaikan permasalahan serta pendapat tentang bagaimana program dapat berjalan dengan baik dan juga dari mana sumber biayanya harus dipertimbangkan dengan jelas

Sumber: Mardikanto dan Soebiato (2019)

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data kualitatif

Menurut Sugiyono (2012) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Jenis data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yaitu data yang non angka yang bersifatnya deskriptif atau Data yang menggambarkan kualitas atau kualitas sesuatu yang ada, ditinjau dari kondisi, proses, kejadian dan lain-lain yang diungkapkan dengan kata-kata. Sedangkan pencarian data ini

dikelola dengan pendekatan kualitatif deskriptif berupa narasi, cerita, setting informatif, dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku, gerak tubuh dan masih banyak lagi yang didominasi oleh angka sebagai peneliti numerik.

b. Data kuantitatif

Yaitu data yang berbentuk angka-angka, yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif.

2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Menurut Sugiyono (2012), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait khususnya perangkat desa dan masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2012) adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder terdiri dari hasil laporan atau catatan kinerja pemerintah desa terkait dengan program-program pemberdayaan masyarakat.

3.2.4 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yaitu langkah untuk mendapatkan data karena tujuan utama dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang disengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan mengamati dan mencatat segala peristiwa dan fenomena yang terjadi serta mengacu pada syarat dan kaidah penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang sistematis untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Bungin (2009:108), wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk mencapai tujuan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan petunjuk wawancara penelitian. tujuan penelitian.
3. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan-laporan kegiatan, foto-foto, data-data penelitian yang relevan. Dokumentasi menurut Bungin (2007:121) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk mengumpulkan data historis. Metode dokumenter atau penelitian adalah metode pengumpulan data dan informan dengan cara mencari dan menemukan bukti-bukti.

3.2.5 Informan Penelitian

Berdasarkan observasi penelitian maka dalam penelitian ini yang menjadi informan peneliti yaitu: BPD, Kepala desa, Bendahara desa, Sekertaris desa, kepala dusun, dan Masyarakat. Informan tersebut dipilih karena dianggap memahami kondisi dan mampu memberikan gambaran yang spesifik terkait dengan tujuan penelitian ini.

Tabel 3.2 Data Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Jumlah
Tiyong Mahmud	BPD	1
Mohamad Chandra Nauko	Kepala Desa	1
Guntur Amu	Sekertaris Desa	1
Wining Pakaya	Kaur Keuangan	1
Helfrianto Amu	Kaur Perencanaan	1
Lolis, asni, Nining, Dela dan Istin	Masyarakat	5
Jumlah		10

3.2.6 Metode Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (2012) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menggambar kesimpulan sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumenter.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti menyimpulkan, memilih yang utama, fokus pada yang penting, mencari topik dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk lebih mengumpulkan data dan mencari saat dibutuhkan.

3. Penyajian data (*Display Data*)

Tampilan data adalah deskripsi dari sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berupa bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan sejenisnya.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Ini adalah kegiatan terakhir dari analisis data. Menarik kesimpulan berupa kegiatan interpretatif yaitu menemukan makna dari data yang disajikan. Selain itu, data yang dianalisis, dijelaskan dan diinterpretasikan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahapan proses dilakukan untuk memverifikasi keabsahan data dengan memeriksa semua data yang ada dari berbagai sumber yang diperoleh di lapangan, serta dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, foto, dll. Dokumenter penelitian, melalui metode wawancara.

BAB IV

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat

Desa Olele terletak di Kecamatan Kabilia Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Wilayah desa ini memiliki batas-batas teritorial dengan desa-desa dan kecamatan sekitarnya. Desa ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang mencakup periode prasejarah hingga masa kini.

Desa Olele terbentuk pada bulan November tahun 2004 sebelum tahun tersebut Desa Olele masih bergabung dengan Desa Oluhuta. Desa Olele terdiri dari 4 Dusun dengan wilayahnya sebagai berikut yaitu: Dusun Indanto dibawah Pimpinan Ibu Rasi AMU, Dusun Olele Tengah dibawah Pimpinan Bapak Sardin Amu, Dusun Pentadu dibawah Pimpinan Bapak Kadir Gani, dan Hungayo Kiki dibawah Pimpinan Bapak Kadir Ishak.

Desa Olele termasuk pada Desa Administratif Pemerintahan Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan Data Potensi Desa, Luas Desa Olele adalah \pm 2.540 Ha dengan Jumlah Penduduk 1020 Jiwa atau 292 KK. Jumlah Penduduk Laki-Laki Sebesar 525 Orang Dan Perempuan 495 Orang. Jumlah KK Miskin Sebanyak 110 KK. Desa Olele terletak di Di Areal Pesisir Pantai Bagian Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Pada zaman prasejarah, daerah ini merupakan wilayah yang dihuni oleh suku-suku asli Gorontalo, yang hidup dari bertani, berburu, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, daerah ini menjadi pusat perdagangan dan kegiatan sosial budaya, terutama pada masa Kerajaan Gorontalo. Pada masa penjajahan Belanda, Desa Olele menjadi pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.

Banyak tokoh-tokoh pejuang nasionalis berasal dari desa ini, seperti H. Abdul Madjid Dg. Ngelawung, H. Abdul Karim Tahir, dan lain-lain. Setelah Indonesia merdeka, Desa Olele menjadi bagian dari Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2007, wilayah ini dimekarkan menjadi Kabupaten Bone Bolango, dan Desa Olele menjadi salah satu desa yang terletak di kecamatan Kabilia Bone.

Desa Olele pada tahun 2004 – 2007 merupakan salah satu desa persiapan di kecamatan Kabilia Bone hasil pemekaran dari Desa Oluhuta dan yang menjadi Penjabat sementara Kepala Desa adalah Bapak Hasan Rahman. Pada tahun 2007 Desa Olele di tetapkan menjadi Desa Definitif dan telah Mengadakan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung yang Merupakan Pilkades yang pertama kali dilakukannya dimana yang menjadi calon Kepala Desa yaitu Bapak Hasan Rahman dan Bapak Roni Abd Kadir. Setelah diadakan Pemilihan Kepala Desa maka yang meraut suara terbanyak yaitu Bapak Roni Abd Kadir Periode 2008 sampai Dengan 2014, akan tetapi Bapak Kepala Desa terpilih Menjadi Kepala Desa sampai tahun (2014) Yaitu Bapak Roni Abd Kadir mengundurkan diri dari jabatan kepala Desa pada tahun 2011. Selanjutnya masa periode beliau dilanjutkan oleh seorang Penjabat Kepala Desa dari Unsur Pemerintah Kecamatan Kabilia Bone dalam hal ini Bapak Syarifudin Arumasi sampai Periode 2012. Pada Bulan Desember Tahun 2012 ini Desa Olele Baru Selesai menyelesaikan PILKADES yang kedua untuk Periode 2012 – 2018 Dimana ada 2 Orang yang menjadi Calon Kepala desa yaitu Bapak Welny H Gani (Tokoh Masyarakat), Hasan Rahman (Tokoh Masyarakat) yang terpilih Menjadi Kepala Desa Olele untuk Pilkades Ke II yang telah Di Laksanakan Di Desa Olele adalah Bapak Hasan Rahman Untuk Periode 2013 – 2018.

Pemerintahan Desa Olele pada tahun 2018 akhir setelah masa jabatan kepala Desa Olele berakhir masih dilanjutkan lagi oleh Penjabat Kepala Desa dari unsur Pemerintah Kecamatan dalam hal ini bapak Starim K. Maabu sampai dengan Bulan September 2019. Dengan berjalananya waktu sambil menunggu Pemilihan Kepala Desa serontak yang dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2019 maka Penjabat Kepala Desa dilanjutkan lagi oleh bapak Hartono S Hulopi mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember tahun 2019.

Pada tahun 2019 akhir Desa Olele menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang ketiga dimana pada pemilihan kepala Desa tahun ini panitia Pilkades menerima bakal calon yang ditetapkan menjadi calon tetap yaitu tiga orang yakni Bapak Welni H Gani nomor urut satu,Bapak Moh,Candra Nauko S.Pd nomor urut dua dan Bapak Rusna Amu nomor urut tiga.Dan setelah dilakukan perhitungan suara di TPS Maka yang meraut suara tebanyak yaitu calon nomor urut dua bapak Moh,Candra Nauko dan dimandatkan menjadi Kepala Desa Olele Periode 2020 sampai dengan 2026 .

Sejak Dulu Penduduk Desa Olele Bermata Pencaharian Sebagai Nelayan sehingga persentase terbesar wilayah Desa Olele adalah Laut lepas dengan hasil sumber daya alam yakni Ikan Tuna, Cumi cumi merupakan komoditi utama dalam prospek ekonomi Masyarakat Desa Olele.

4.1.1 Kondisi Umum Desa: Geografis & Demografi

Desa Olele terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Indanto, Dusun Olele Tengah, Dusun Pentadu dan dusun Hunganyo Kiki. Desa Olele termasuk pada Desa Administratif Pemerintahan Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan Data Potensi Desa, Luas Desa Olele adalah ± 2.540 Ha. Daerah teritorial Desa Olele yaitu

Sebelah Utara: Desa Lambangan dan Desa Bambu Kuning.

Sebelah Timur: Desa Longkib dan Desa Tundulio;

Sebelah Selatan: Desa Popodu dan Desa Ngilngof;

Sebelah Barat: Desa Bolihuyu dan Desa Leato.

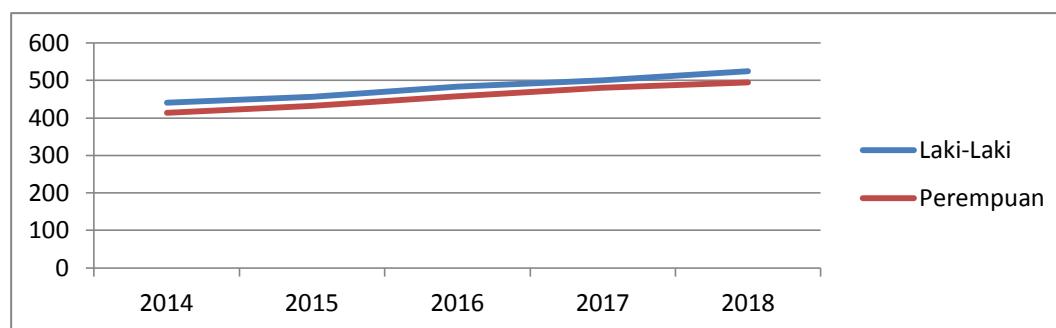
Berdasarkan Data Potensi Desa, Luas Desa Olele adalah \pm 2.540 Ha. Secara terperinci dapat ditampilkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peruntukan Lahan

NO	PERUNTUKAN LAHAN	LUAS
1	Luas Tanah Kering	1.505 Ha
2	Luas Tanah Basah	0 Ha
3	Luas Tanah Perkebunan	20 Ha
4	Luas Fasilitas Umum	21 Ha
5	Luas Tanah Hutan	994 Ha
TOTAL		2.540 Ha

Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk

NO.	JENIS KELAMIN	2014	2015	2016	2017	2018	%
1.	LAKI-LAKI	440	456	483	500	525	4,9 %
2.	PEREMPUAN	413	432	458	480	495	4,5 %
	JUMLAH	853	888	941	980	1020	9,4 %

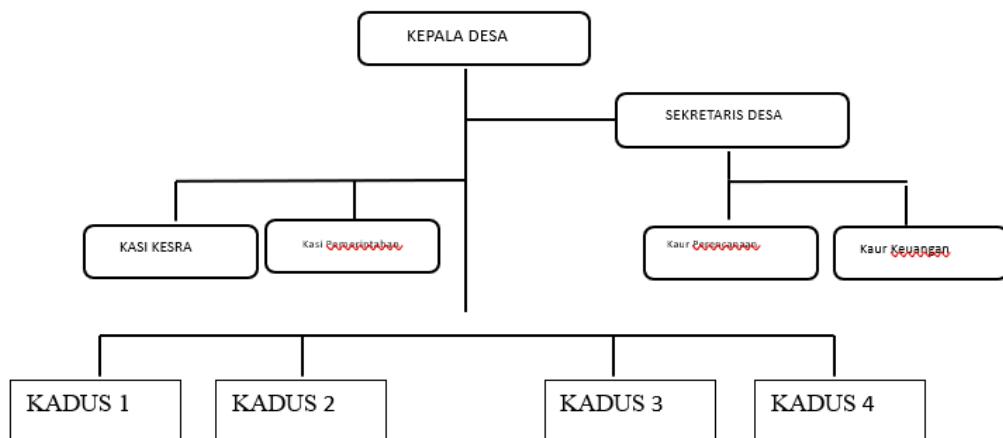


Sumber: data Profil Desa Tahun 2018

4.1.2 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Olele dapat di lihat pada bagan berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Olele 2019-2025



Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Tugas Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur **Pimpinan Sekretariat Desa**. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai *unsur pelaksana teknis*. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

4. Tugas Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai *unsur staf sekretariat*. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi

pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Tugas Kepala Kewilayah

Kepala Kewilayah atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai *unsur satuan tugas kewilayah* yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayah/ Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan

wilayah.

- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Olele, Desa Olele memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti perkebunan kelapa dan cengkeh, serta potensi pariwisata yang menarik. Desa ini juga terkenal dengan budaya dan tradisi unik, seperti upacara adat Pekasepa, yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober. Wilayah Desa Olele memiliki luas sekitar 1.765,58 hektar, dengan kondisi geografis berupa dataran rendah dan pegunungan. Desa ini memiliki keindahan alam yang memukau, dengan panorama perbukitan yang hijau dan hamparan sawah yang subur.

Secara umum, pertumbuhan penduduk di wilayah pedesaan seperti Desa Olele cenderung stabil atau bahkan menurun seiring dengan peningkatan kualitas hidup dan pendidikan, serta akses ke layanan kesehatan dan keluarga yang lebih baik. Namun, pertumbuhan penduduk masih tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, mortalitas, dan migrasi.

Perkembangan perekonomian di daerah pedesaan sering kali tergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Oleh karena itu, jika Desa Olele memiliki sektor pertanian yang berkembang pesat seperti perkebunan kelapa dan cengkeh, serta potensi pariwisata yang menarik khususnya pariwisata kelautan, maka perekonomian desa tersebut kemungkinan besar akan mengalami

pertumbuhan.

Selain itu, terdapat beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan seperti Desa Olele, seperti program pembangunan infrastruktur, program bantuan modal usaha mikro, serta program pengembangan industri kecil dan menengah di daerah tersebut. Hal-hal ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Untuk mendapatkan data terkait untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa apparat desa yang merupakan informan kunci.

Langkah awal peneliti melakukan pendekatan dengan apparat desa yang menjadi sasaran penelitian, Peneliti mendapatkan kesempatan mewawancarai Bapak Mohammad Chandra Nauko selaku Kepala Desa Olele. Banyak hal yang disampaikan oleh kepala desa tentang program yang telah dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana desa. Sebagaimana yang dituturkan bahwa:

“Pemberdayaan memang penting untuk masyarakat desa, ini kalau melihat masyarakat kita yang banyak aktivitasnya menjadi nelayan dan petani memang butuh program-program yang bisa menyentuh langsung dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka”

Kepala desa menjelaskan pandangannya terkait pentingnya program pemberdayaan bagi warga desa olele. Lebih lanjut beliau mengungkapkan Kembali bahwa:

“Di desa ini sudah banyak program yang kami lakukan, Program-program ini didanai dari dana desa. Misalnya ada kegiatan pembangunan jalan untuk akses para petani, kalau ada program seperti ini butuh anggaran yang lumayan buat material dan gaji para tukang. Sebelumnya itu kami menganggarkan sekitar Rp. 80.000.000 buat 1 ruas jalan”

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Helfrianto selaku Kaur Perencanaan yang

saat itu sedang duduk Bersama Kepala Desa Olele.

“...kalau soal pemberdayaan banyak ada beberapa program yang sudah kami rencanakan, tapi untuk pelaksanaan program itu pastinya kita melihat kemampuan dari anggaran itu, jadi kita harus ada program prioritas yang sekiranya mampu terlaksana baik dari anggaran maupun waktu”

singkat dengan kepala desa dan kaur perencanaan tergambar bahwa di desa olele telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia dalam kas desa.

4.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Bina manusia meliputi upaya penguatan atau pengembangan kapasitas individunya serta pengembangan kapasitas sistem jejaring untuk memperluas jaringan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Untuk mendapatkan data, peneliti berdiskusi dengan Bapak Guntur Amu selaku Sekretaris Desa Olele. Peneliti bertanya upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan dana desa untuk kegiatan bina manusia? Beliau menjelaskan bahwa :

“... Bina manusia juga masuk dalam program tahunan, kami ada namanya kegiatan-kegiatan dalam naungan bidang pembinaan kemasyarakatan. Misalnya kami menganggarkan untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan. Jadi ada kegiatan itu khusus untuk PKK yang fokus untuk membina anggota masyarakat untuk lebih berdaya. Anggota PKK ini bisa belajar keterampilan buat kue, kerajinan yang nantinya dapat dijual”

Pendapat ini dibenarkan oleh kepala desa, yang menyatakan bahwa kegiatan PKK itu penting untuk mendorong agar masyarakat olele bisa memiliki skill untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini sebagaimana ungkapannya:

“... betul itu, masyarakat ini *kan* khususnya ibu-ibu yang cuma di rumah

itu harus diberdayakan. Caranya bagaimana? Ya kasih pelatihan pelatihan, meskipun kerja di kebun atau jadi nelayan tetap harus punya keterampilan. Ini sangat membantu kalau tiba tiba sudah tidak kerja lagi sebagai petani atau nelayan”.

Bapak Guntur menambahkan kembali bahwa program bina manusia tidak hanya sebatas pemberdayaan kepada TIM PKK namun juga ada beberapa program seperti program pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagaimana ungkapan beliau bahwa:

“ada juga yang namanya program pembinaan kerukunan umat beragama. Ini juga penting yah, karena masyarakat itu terdiri dari berbagai keyakinan apalagi dalam beragama, jadi sebagai pemerintah desa harus bisa merekatkan perbedaan ini. Misalnya kami buat kegiatan-kegiatan seperti bakti social yang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Ini bisa meningkatkan kerukunan beragama antar warga desa. Jadi ada sikap saling menghargai. Ini terlihat kalau ada hari-hari besar agama masyarakat itu saling menghargai, saling mengunjungi dan saling bantu jika ada yang membutuhkan bantuan. Pembinaan masyarakat juga sudah sering kita anggarkan. Kita usahakan bisa memberikan kegiatan pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Khususnya Program pemberdayaan perempuan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, jadi harus paham bagaimana perkembangan politik saat ini, bagaimana bisa hidup bersosial, dan budaya.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyakan berapa dana yang dianggaran untuk program-program tersebut? Pertanyaan ini dijelaskan secara gamblang oleh Ibu Wining selaku Kaur Keuangan:

“... kalau tidak salah kurang lebih sekitar Rp. 21.000.000 dana yang kami anggarkan, itu kami sesuaikan dengan program yang sudah direncanakan, bisa lebih dari nilai itu.

Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa program-program bina manusia jika dirancang dan dilaksanakan dengan optimal, diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

4.2.2 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Usaha

Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Bina usaha mencakup pemilihan komoditas dan juga suatu usaha untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di desa, dengan cara perencanaan dan pengembangan usaha masyarakat dengan memprakarsai pembentukan suatu badan usaha sebagai penanggungjawab dan juga sebagai manajemen bisnis bagi masyarakat agar dapat berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Pada suatu kesempatan berdialog dengan kepala desa, peneliti menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh apparat desa terkait dengan program-program bina usaha untuk membantu perekonomian masyarakat desa olele.

“...masyarakat desa ini banyak usahanya, tapi lebih banyak usaha bertani dan nelayan. Ada juga masyarakat yang beternak. Kami selaku apparat desa tentunya mempunyai perhatian dalam hal ini. Kami banyak memberikan bantuan melalui program-program desa.”

Lebih lanjut pak Guntur ikut menambahkan bahwa :

“benar itu, ada yang Namanya program pembinaan kelembagaan masyarakat, ini termasuk menyediakan inseminator atau pengawas untuk ternak sapi. Memang ada beberapa warga kita itu yang gemar beternak, *nah* kami fasilitasi itu dengan memberikan pengetahuan seputar cara beternak yang baik.”

Lebih lanjut peneliti bertanya terkait pengawasan ternak apakah dibiayai dari anggaran desa atau dibiayai dari masyarakat sendiri? Hal ini dijelaskan oleh ibu Wining sebagai berikut:

“Kalau inseminator itu programnya desa, jadi harus kami anggarkan. Itu sekitar Rp.3.000.000 per periode. Program ini memang sangat membantu para peternak, biasanya dulu itu banyak peternak yang rugi kasihan. Karena dulu itu banyak penyakit yang bisa kena di sapi. Nah kalau sudah kena penyakit, sudah tidak bisa diapa apakan lagi ternak ternak itu. Mau jual juga gak bisa kan. Tapi masih ada juga masyarakat yang tidak bisa membedakan

sapi yang sudah berpenyakit dengan yang masih sehat, sehingga kadang banyak kasus-kasus pengaduan ke desa.

Lebih lanjut disampikan oleh kepala dusun bahwa :

“Alhamdulillah,, tahun lalu itu kita dapat bantuan untuk pembuatan kendang ternak. Jadi kalau misalnya ada warga yang memiliki ternak baik ternak sapi, ternak ayam, ternak kambing itu tidak dibedakan. Ini sangat membantu mengamankan ternak-ternak dari warga. Karena jaman sekarang banyak juga yang mengintai ternak-ternak itu, lagi pula ini membantu biar ternak itu tidak lepas ke jalan atau ke kebun warga lain yang memicu terjadinya pertikaian antar warga akibat ternak yang berkeliaran.”

Kepala desa memberikan penjelasan tambahan terkait dengan bina usaha yang ada di desa olele.

“...untuk bina usaha di des ini kami upayakan ada sebuah Lembaga yang bisa mengakomodir usaha-usaha kecil dari warga olele. Kami sudah mendirikan BUMDES yaitu Usaha Desa. Jadi kalau ada potensi-potensi desa yang bisa meningkatkan penghasilan itu biasanya mendapat perhatian khusus. Itu memang gak main-main yah, melalui BUMDES itu kerajikan tangan maupun kue-kue yang dibuat oleh kelompok-kelompok usaha itu biasanya masuk di BUMDES”.

Pernyataan ini dibenarkan oleh ibu Wining selaku Kaur Keuangan. Beliau memaparkan bahwa anggaran pendirian bumdes itu menghabiskan anggaran hingga ratusan juta. Hal ini sebagaimana ungkapan beliau:

“Kalau BUMDES itu memang ditujukan untuk membantu masyarakat. Misalnya begini, kalau ada warga yang punya usaha katakanlah membuat kue kering. Itu biasanya kalau tidak dibantu BUMDES yang beli hanya orang disekitar saja. Nah itu kalau Kerjasama dengan BUMDES pemasarannya bisa lebih luas. Nah, ini sangat membantu para UKM. Kalau soal dana itu memang lumayan, modal BUMDES itu sekitaran Rp. 350.000.000,”

Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa pembentukan BUMDES merupakan sebuah kebijakan untuk pengembangan ekonomi lokal, pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di desa dapat memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan usaha warga. BUMDES adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa atau kelompok masyarakat di dalam desa, yang bertujuan

untuk mengelola dan mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di tingkat desa.

4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Lingkungan

Bina Lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Suatu upaya dalam memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan cara memaksimalkan potensi lokal Desa untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga memberikan kesadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan lebih efektif.

Dalam suatu kesempatan peneliti banyak berdiskusi dengan Helfirianto terkait program-program Bina Lingkungan. Sebagai salah satu apparat desa yang menempati Kaur Perencanaan beliau menjelaskan banyak terkait hal tersebut. Peneliti menanyakan Apa program terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan? Bagaimana mengimplementasikan dalam kegiatan dan program desa? Beliau menjelaskan bahwa:

maupun pelestarian lingkungan. Misalnya seperti memperkenalkan sistem pengelolaan sampah terpadu, penghijauan desa dengan program penanaman pohon. Kami juga berusaha untuk membuat program yang sekaligus bisa bermanfaat bagi warga misalnya program pembangunan jalan akses pertanian. Ini tetap memperhatikan lingkungan.”

Penjelasan ini dibenarkan oleh kepala desa yang memaparkan beberapa jenis program untuk perbaikan lingkungan misalnya:

“...di desa olele itu sangat memperhatikan drainase. Jadi ada program pembangunan saluran drainase, biar tidak ada sumbatan-sumbatan air. Biasanya ini yang bikin nyamuk dan pasti akan menimbulkan penyakit. Itu yang kami jaga. Begitupun untuk menertibkan masyarakat dalam membuang hajat agar tidak sembarangan biasanya kami buat MCK, juga

sumur gali dibagian yang strategis biar bisa dimanfaatkan oleh warga”.

Dari Kaur keuangan mengungkapkan besaran dana yang digelontorkan untuk menjalankan program tersebut. Sebagaimana ungkapan beliau bahwa:

“...kegiatan-kegiatan ini biasanya kami menganggarkan biasanya sekitar Rp.28.000.000 untuk per program. Sebisa mungkin kami melakukan program-program yang bermanfaat sesuai dengan dana yang tersedia.”

Dari pernyataan di atas menggambarkan bahwa pemerintah desa sudah berusaha membuat program yang bisa bermanfaat sekaligus bisa melestarikan lingkungan.

Selanjutnya peneliti bertanya bahwa Apa hambatan atau tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan program bina lingkungan? Bagaimana pemerintah desa mengatasi tantangan tersebut.

“Salah satu tantangan utama yang susah dihindari itu adalah kesadaran dan pemahaman yang masih perlu ditingkatkan dikalangan warga desa terkait pentingnya pelestarian lingkungan. Sehingga itu kami sebisa mungkin agar ada partisipasi aktif dari masyarakat.”

Hal ini dibenarkan oleh pak helfrianto bahwa tantangannya adalah pada kesadaran masyarakat. Sebagaimana ungkapan beliau:

“Aduh, memang masih sulit. Banyak fasilitas untuk lingkungan ini, tapi yah begitu,, tidak ada rasa memiliki sehingga banyak yang rusak. Disisi lain kan kami juga menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam melaksanakan program ini. Namun, itu tantangan ke depannya, bagaimana bisa mengatasi hal ini. Yah, melalui himbauan, kampanye edukasi dan mencari dukungan dari mitra eksternal.”

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa kondisi kesadaran masyarakat yang rendah tentang lingkungan dapat memiliki beberapa konsekuensi yang berdampak negatif. Seperti Penurunan Kualitas Hidup: Lingkungan yang rusak berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Polusi udara dan air, kehilangan sumber daya alam, serta kerusakan ekosistem dapat menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat, peningkatan penyakit, dan penurunan produktivitas sektor ekonomi yang bergantung pada lingkungan, seperti sektor pertanian dan pariwisata.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada kepala desa control dan evaluasi yang dilakukan oleh apparat desa terhadap program-program tersebut? Beliau menjelaskan bahwa:

“Kami melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kemajuan dan dampak dari program bina lingkungan kami. Kami memiliki indikator kinerja yang ditetapkan, seperti jumlah sampah terkelola, luas lahan hijau, atau pengelolaan air bersih. Data ini membantu kami mengukur keberhasilan program dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan”.

Dari penjelasan di atas, menggambarkan pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencanangkan program-program untuk pelestarian lingkungan dengan mengontrol dan mengevaluasi agar bisa lakukan Langkah-langkah perbaikan kedepannya.

4.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Program Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya penting dalam menguatkan peran-peran masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan dalam upaya mensejahteraan masyarakat.

Bina kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan. Sebagai suatu hal yang disetujui dan memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen seperti, 1) Komponen person, 2) Komponen kepentingan, 3) komponen aturan, dan 4) Komponen Struktur. Bina kelembagaan ditandai dengan aktifnya peran Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Tim Pelaksana Program Desa. Setiap kelembagaan mempunyai peran penting dalam bahu membahu untuk menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu dalam menyelesaikan permasalahan serta pendapat tentang bagaimana program dapat berjalan dengan baik dan juga

dari mana sumber biayanya harus dipertimbangkan dengan jelas. Keberhasilan dari bina mansia, bina usaha, dan bina lingkungan dipengaruhi oleh ketersediaan dan peran penting dari kelembagaan yang telah bersinergi secara optimal.

Peneliti membahas masalah ini dengan sekretaris desa yaitu bapak Guntur yang menuturkan bahwa:

“Rencana pembangunan jangka menengah dan panjang desa perlu dibuat dengan melibatkan warga desa dan instansi terkait. Rencana ini akan menjadi acuan dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan bina manusia dan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan desa”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa beberapa program bina Lembaga yang bertujuan memperkuat dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di desa:

“banyak program terkait itu misalnya ada kegiatan pembinaan Lembaga kemasyarakatan. Kalau ini biasanya lebih ke internal desa. Karena ini bagus untuk pengembangan apparat desa. Jadi ada pelatihan pengelolaan keuangan, perbaikan administrasi. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan juga buat masyarakat”.

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa peningkatakan kapasitas aparatur desa juga menjadi hal yang perlu dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut beliau memaparkan Kembali program-program terkait kelembagaan.

“Program yang ditujukan kepada masyarakat juga ada seperti pengelolaan Lembaga-lembaga UMKM, khususnya yang produknya bisa dipasarkan hingga keluar desa ini butuh pembinaan, bagaimana bisa meluaskan pemasarannya”. Nah ini juga buat pemberdayaan perempuan, bagi ibu-ibu rumah tangga itu harus diberdayakan, dari pelatihan, keterampilan biar bisa mandiri. Kan kalau punya usaha bisa bantu suaminya memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatkan pendapatan keluarga itu yang kami harapkan.

Peneliti menanyakan anggaran yang disediakan untuk setiap program-program tersebut kepada kaur keuangan. Beliau menjelaskan bahwa:

“masing masing program itu berbeda anggarannya, sekali lagi kita sesuaikan kebutuhan dengan dana di kas desa. Misalnya untuk pembinaan kemasyarakatan itu kita anggarakan Rp.13.200.000,- itu untuk kegiatan yang

tergolong kecil, kalau yang kegiatan-kegiatan besar misalnya pemberdayaan pos yandu, kegiatan Pendidikan anak usia dini itu sampai Rp.30.000.000, kurang lebih gitu.”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program-program yang sudah direncakan? Pak Guntur menjelaskan bahwa:

“memang setiap program itu kalau dijalankan tidak selamanya mulus, pasti ada hambatan, kendala yang dihadapi dilapangan. Terutama masyarakat yang tidak paham akan fungsi dari Lembaga-lembaga ini, tidak maksimal mengikuti program-program, padahal ini tujuannya untuk mereka juga kan. Belum lagi disini internet masih belum stabil yah jaringannya. Itu kendala juga bagi UMKM kasihan. Pemasaran online masih sulit.

Dari penjelasan tersebut menggambarkan program-program yang dibuat oleh desa olele sudah berusaha mengakomodir kebutuhan kelembagaan masyarakat desa olele. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi seperti masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat dan kontribusi yang dapat diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga sulit untuk memperoleh partisipasi aktif dari mereka.

Keterbatasan Sumber Daya juga masih menjadi kendala secara umum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masayarakatnya. Terbatasnya dana dan personel dapat membatasi kapasitas lembaga dalam menyelenggarakan pelatihan, mendapatkan bantuan teknis, atau mengelola program dengan efektif. Eksistensi dan ketidakstabilan internal juga adalah salah satu kendala yang masih sulit diatasi. Tidak jarang lembaga-lembaga di desa menghadapi resistensi internal terhadap perubahan atau perbaikan. Beberapa anggota lembaga mungkin tidak ingin mengubah cara kerja atau menghadapi tantangan baru. Selain itu, adanya ketidakstabilan internal dalam lembaga, seperti konflik kepentingan, perubahan kepemimpinan yang sering, atau ketidaktersediaan anggota lembaga yang

konsisten, dapat menghambat kelancaran program bina kelembagaan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Bina Manusia

Bina manusia meliputi upaya penguatan atau pengembangan kapasitas individunya serta pengembangan kapasitas sistem jejaring untuk memperluas jaringan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Memaksimalkan dana desa untuk kegiatan bina manusia di Desa Olele harus dapat dilakukan secara maksimal agar anggaran yang digelontorkan bisa memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan menemukan bahwa Bina manusia merupakan program tahunan yang dilaksanakan dalam naungan bidang pembinaan kemasyarakatan. Misalnya kegiatan pembinaan organisasi perempuan. yaitu kegiatan khusus untuk PKK yang fokus untuk membina anggota masyarakat untuk lebih berdaya. Anggota PKK ini bisa belajar keterampilan buat kue, kerajinan yang nantinya dapat dijual. Kegiatan PKK itu penting untuk mendorong agar masyarakat olele bisa memiliki skill untuk membantu perekonomian keluarga.

Selain itu ada program pembinaan kerukunan umat beragama, karena masyarakat itu terdiri dari berbagai keyakinan beragama, Misalnya bakti social yang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Ini bisa meningkatkan kerukunan beragama antar warga desa. Kegiatan ini bisanya memakan anggaran sebesar Rp. 21.000.000 untuk setiap tahunnya.

Dari hasil diskusi dengan apparat desa olele dapat digambarkan bahwa dalam menjalankan program manusia masih terdapat beberapa kendala misalnya:

1. Keterbatasan Anggaran: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan bina manusia yang direncanakan. Hal ini dapat membatasi implementasi program dan mengurangi dampak yang diharapkan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Terlatih: Program bina manusia membutuhkan tenaga terlatih dan kompeten untuk melaksanakan kegiatan dengan efektif. Namun, terkadang desa mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat. Ini dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan program.
3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program bina manusia. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, program tersebut mungkin tidak mencapai hasil yang optimal. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
4. Perubahan Kebijakan dan Prioritas: Terkadang, perubahan kebijakan pemerintah atau pergeseran prioritas pembangunan dapat mengganggu kontinuitas program bina manusia. Hal ini dapat menyebabkan program terhenti atau mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan yang sudah dimulai.
5. Tantangan Geografis dan Infrastruktur: Beberapa desa mungkin menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, seperti akses yang sulit, terutama dalam wilayah pedesaan atau terpencil. Ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan menghambat pencapaian hasil yang diharapkan.

6. Evaluasi dan Monitoring yang Kurang Memadai: Kurangnya evaluasi dan monitoring yang sistematis dapat menjadi kendala dalam mengukur efektivitas program bina manusia. Tanpa pemantauan yang baik, sulit untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi permasalahan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala ini sebelumnya dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat pemantauan dan evaluasi program dapat membantu mengatasi kendala dalam menjalankan program bina manusia.

Dalam mencapai tujuan ini diperlukan penyusunan rencana kerja yang terstruktur dan terukur sebelum menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Rencana kerja yang terstruktur dan terukur akan memudahkan dalam pengalokasian dana desa. Dalam menyusun rencana kerja tersebut, harus diperhatikan prioritas kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah desa bisa melakukan survei dan analisis kebutuhan masyarakat sebelum melakukan kegiatan, perlu dilakukan survei dan analisis kebutuhan masyarakat terlebih dahulu agar program kegiatan yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mengembangkan potensi masyarakat dapat menjadi langkah awal dalam melakukan kegiatan bina manusia. Potensi masyarakat yang dapat dikembangkan antara lain potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi dan potensi pariwisata.

Melakukan pelatihan dan pendampingan dapat membantu meningkatkan

keterampilan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti keterampilan usaha, keterampilan pertanian, dan lain-lain. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga perlu dipikirkan cara-cara bagaimana masyarakat dapat melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan, baik dari segi sumber daya, keuangan dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan dari program tersebut pemerintah desa harus melakukan evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara teratur untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program yang telah dilakukan serta memberikan umpan balik bagi kegiatan yang akan datang.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan dana desa yang diterima oleh Desa Olele dapat dimaksimalkan untuk kegiatan bina manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Olele secara keseluruhan.

4.3.2 Bina Usaha

Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Bina usaha mencakup pemilihan komoditas dan juga suatu usaha untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di desa, dengan cara perencanaan dan pengembangan usaha masyarakat dengan memprakarsai pembentukan suatu badan usaha sebagai penanggungjawab dan juga sebagai manajemen bisnis bagi masyarakat agar dapat berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan menemukan bahwa Bina Usaha merupakan program-program yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat olele. misalnya program pembinaan

kelembagaan masyarakat, ini termasuk menyediakan inseminator atau pengawas untuk ternak sapi. program ini dianggarkan kurang lebih Rp.3.000.000,- per periode. Program ini memang sangat membantu para peternak untuk memantau kondisi ternak. Selain itu, mendirikan sebuah Lembaga yang bisa mengakomodir usaha-usaha kecil dari warga olele yaitu BUMDES. Pembentukan BUMDES merupakan sebuah kebijakan untuk pengembangan ekonomi lokal, pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di desa dapat memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan usaha warga. BUMDES adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa atau kelompok masyarakat di dalam desa, yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di tingkat desa. Modal BUMDES cukup besar yaitu Rp. 350.000.000.

Sebagai sebuah kebijakan pengembangan ekonomi lokal, pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di desa dapat memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan usaha warga. BUMDES adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa atau kelompok masyarakat di dalam desa, yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di tingkat desa.

Pendirian BUMDES dapat memberikan beberapa manfaat penting berupa:

(1) BUMDES dapat menjadi sarana untuk mengorganisir dan mengelola usaha-usaha kecil dan mikro di desa. Dengan demikian, BUMDES dapat memberikan peluang kepada warga desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan mereka. (2) BUMDES dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan sumber daya yang ada di desa. Misalnya, BUMDES dapat mendorong pengembangan usaha pertanian, kerajinan, pariwisata, atau jasa-jasa lokal lainnya. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah

produk-produk desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. (3) BUMDES dapat menjadi lembaga yang memfasilitasi akses ke modal dan sumber daya lainnya bagi usaha-usaha di desa. BUMDES dapat membantu warga desa dalam mengakses pembiayaan, pelatihan, pemasaran, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Dengan adanya dukungan ini, usaha-usaha warga dapat berkembang lebih baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bertahan dan tumbuh.

Namun, penting juga untuk memperhatikan beberapa faktor kunci dalam pembentukan BUMDES. Pertama, perlu adanya kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDES. Keterlibatan masyarakat secara langsung dan transparan sangat penting agar BUMDES dapat berjalan dengan baik dan mewakili kepentingan seluruh warga desa. Kedua, diperlukan manajemen yang profesional dan keterampilan pengelolaan usaha yang memadai agar BUMDES dapat beroperasi secara efisien dan berhasil dalam mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada pengelola BUMDES dapat menjadi investasi yang berharga untuk keberhasilan jangka panjang. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa BUMDES tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di desa. Ini termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan, menjaga keseimbangan sosial, dan memastikan distribusi manfaat yang adil kepada seluruh warga desa.

Secara keseluruhan, pembentukan BUMDES memiliki potensi besar untuk meningkatkan usaha warga di desa. Namun, implementasi yang baik, keterlibatan aktif masyarakat, manajemen yang baik, dan komitmen terhadap keberlanjutan sangat penting agar BUMDES dapat memaksimalkan dana desa untuk kegiatan

bina usaha pada Desa Olele, seharusnya pemerintah dapat membuat Rencana Usaha Desa. Dalam hal ini perlu dibuat rencana usaha desa dengan melibatkan warga desa dan instansi terkait. Rencana ini akan menjadi acuan dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan bina usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan usaha di desa.

Selain itu, pemerintah desa harunya menentukan Prioritas Kegiatan Bina Usaha serta dapat mengalokasikan Dana Secara Efisien dan Transparan; Dana desa yang sudah ditentukan untuk kegiatan bina usaha perlu dialokasikan secara efisien dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat mekanisme pengawasan yang ketat dan melibatkan warga desa dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Dalam menjalankan program bina usaha juga tidak luput dari beberapa kendala yang seringkali sulit untuk dihindari, antara lain:

1. Keterbatasan Modal: Salah satu kendala utama dalam program bina usaha adalah keterbatasan modal. Usaha membutuhkan investasi awal yang cukup besar, seperti untuk pembelian peralatan, bahan baku, atau modal kerja. Keterbatasan modal dapat menjadi hambatan bagi masyarakat desa yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.
2. Kurangnya Akses ke Pembiayaan: Selain keterbatasan modal, kurangnya akses ke pembiayaan juga menjadi kendala dalam menjalankan program bina usaha. Masyarakat desa mungkin sulit memperoleh pinjaman atau modal usaha dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan atau informasi yang dibutuhkan.
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Pengelolaan Usaha:

Keberhasilan usaha sangat tergantung pada pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang manajemen usaha, pemasaran, keuangan, atau produksi dapat menjadi kendala dalam menjalankan program bina usaha.

4. Kurangnya Pasar dan Jaringan Pemasaran: Salah satu tantangan dalam menjalankan usaha di desa adalah kurangnya pasar yang cukup besar dan jaringan pemasaran yang efektif. Masyarakat desa mungkin menghadapi kesulitan dalam menjual produk mereka atau mencapai pasar yang lebih luas.
5. Tantangan Infrastruktur dan Aksesibilitas: Infrastruktur yang terbatas atau buruk, seperti jalan yang rusak atau akses listrik yang tidak memadai, dapat menjadi kendala dalam menjalankan program bina usaha di desa. Tantangan aksesibilitas juga dapat mempengaruhi distribusi produk atau bahan baku.
6. Perubahan Kebijakan dan Regulasi: Perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan usaha. Ketidakpastian dalam kebijakan atau perubahan aturan dapat menciptakan ketidakstabilan dan kesulitan dalam menjalankan program bina usaha.
7. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah seperti memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, mengembangkan jaringan pemasaran, memfasilitasi akses ke pembiayaan, memperbaiki infrastruktur, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan kebijakan. Dengan memperhatikan kendala-kendala ini, program bina usaha di desa dapat dijalankan dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan ekonomi lokal.

Untuk lebih meningkatkan potensi wirausaha dari warga desa, pemerintah seharusnya memberikan Pelatihan dan Bantuan Teknis agar dapat meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha, perlu diberikan pelatihan dan bantuan teknis. Pelatihan dan bantuan teknis ini dapat diberikan melalui kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga swadaya masyarakat.

Usaha lainnya juga yang tak kalah penting yaitu melakukan Evaluasi dan Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kegiatan. Evaluasi dan monitoring perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa kegiatan bina usaha berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas dari penggunaan dana desa dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan melaksanakan langkah-langkah di atas, diharapkan penggunaan dana desa untuk kegiatan bina usaha pada Desa Olele dapat dioptimalkan dan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat desa.

4.3.3. Bina Lingkungan

Suatu upaya dalam memberdayakan masyarakat dengan cara melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan cara memaksimalkan potensi lokal Desa untuk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga memberikan kesadaran masyarakat untuk pelestarian lingkungan. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan lebih efektif.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan menemukan bahwa di desa olele terdapat program-program yang berkaitan dengan perlindungan maupun pelestarian lingkungan. Misalnya seperti

memperkenalkan sistem pengelolaan sampah terpadu, penghijauan desa dengan program penanaman pohon. Program dibuat sekaligus bisa bermanfaat bagi warga misalnya program pembangunan jalan akses pertanian. Ini tetap memperhatikan lingkungan sekitar.

Di desa olele juga sangat memperhatikan drainase. yaitu melalui program pembangunan saluran drainase, biar tidak ada sumbatan-sumbatan air. Pembangunan MCK dan Sumur galian buat masyarakat untuk penyediaan air bersih. Kegiatan-kegiatan ini biasanya menghabiskan anggaran sekitar Rp.28.000.000 untuk per program

Dalam pelaksanaannya terkadang ada hambatan berupa kondisi kesadaran masyarakat yang rendah tentang lingkungan dapat memiliki beberapa konsekuensi yang berdampak negatif. Seperti Penurunan Kualitas Hidup: Lingkungan yang rusak berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Polusi udara dan air, kehilangan sumber daya alam, serta kerusakan ekosistem dapat menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat, peningkatan penyakit, dan penurunan produktivitas sektor ekonomi yang bergantung pada lingkungan, seperti sektor pertanian dan pariwisata, meskipun banyak pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencanangkan program-program untuk pelestarian lingkungan dengan mengontrol dan mengevaluasi agar bisa lakukan Langkah-langkah perbaikan kedepannya.

Pemerintah desa seharunya dapat mengidentifikasi potensi lingkungan usaha serta lingkungan social dengan baik, prioritas kegiatan lingkungan usaha perlu ditentukan dengan mempertimbangkan potensi yang ada serta kebutuhan dan minat masyarakat desa. Misalnya, pengembangan usaha pertanian dengan memperbaiki irigasi atau pengadaan alat pertanian yang ramah lingkungan, atau

pengembangan usaha pariwisata dengan mempromosikan objek wisata yang ramah lingkungan.

Lingkungan sosial saat ini juga harus diperhatikan dalam menjaga kondisi yang stabil dalam masyarakat. Berbagai perubahan dan dinamika social yang dapat mempengaruhi masyarakat bisa terjadi melalui berbagai aspek misalnya teknologi dan Media Sosial: Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, memfasilitasi pertukaran informasi, dan mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat.

Ada beberapa hal yang seringkali menjadi hambatan dalam menjalankan program bina lingkungan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hambatan tersebut berupa:

1. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program bina lingkungan sering kali menjadi kendala. Beberapa masyarakat mungkin kurang memahami pentingnya perlindungan lingkungan atau tidak memiliki motivasi yang cukup untuk terlibat aktif dalam kegiatan bina lingkungan. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Program bina lingkungan membutuhkan sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang memadai. Namun, terbatasnya sumber daya tersebut seringkali menjadi kendala dalam menjalankan program. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli lingkungan, atau keterbatasan infrastruktur dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian hasil yang diharapkan.

3. Koordinasi dan Kolaborasi Antarinstansi: Program bina lingkungan sering melibatkan berbagai instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dapat menghambat pelaksanaan program, terutama jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab.
4. Evaluasi dan Monitoring yang Tidak Memadai: Evaluasi dan monitoring yang tidak memadai dapat menghambat pemantauan efektivitas program dan identifikasi permasalahan yang muncul. Kurangnya pemantauan yang sistematis dapat membuat sulit untuk mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi kesalahan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengalokasikan sumber daya yang memadai, meningkatkan koordinasi antarinstansi, membangun infrastruktur yang diperlukan, dan melaksanakan evaluasi dan monitoring yang baik. Dalam menjalankan program bina lingkungan, terdapat beberapa kendala yang biasanya dihadapi, antara lain:

Isu Sosial dan Perubahan Nilai juga saat ini mempengaruhi pergerakan masyarakat. Perubahan nilai-nilai dan kesadaran sosial telah mendorong perubahan dalam pandangan dan tindakan masyarakat terkait isu-isu ini. Pemerintah desa harus menggalakkan Pelatihan dan Pendidikan terkait lingkungan usaha perlu dilakukan kepada masyarakat desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa terkait pengelolaan lingkungan yang baik dan ramah lingkungan. Melakukan Riset dan Inovasi; Melakukan riset dan inovasi terkait lingkungan usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam

dan lingkungan. Misalnya, pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian atau peternakan menjadi pupuk organik.

Evaluasi dan Monitoring yang oleh pemerintah desa olele bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan lingkungan usaha berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas dari penggunaan dana desa dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dengan melaksanakan langkah-langkah di atas, diharapkan penggunaan dana desa untuk kegiatan lingkungan usaha pada Desa Olele dapat dioptimalkan dan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan ekonomi desa dan pelestarian lingkungan yang baik dan ramah lingkungan.

4.3.4 Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya penting dalam menguatkan peran-peran masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan dalam upaya mensejahteraan masyarakat.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan menemukan bahwa di desa olele terdapat program-program untuk peningkatakan kapasitas aparatur desa. program ini menjadi hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ada juga program pengelolaan Lembaga-lembaga UMKM, khususnya yang produknya bisa dipasarkan hingga keluar desa ini butuh pembinaan, bagaimana bisa meluaskan pemasarannya. Untuk penganggaran bagi kegiatan pembinaan kemasyarakatan itu sekitar Rp.13.200.000,- itu untuk kegiatan yang tergolong kecil, kalau yang kegiatan-kegiatan besar misalnya pemberdayaan pos yandu, kegiatan Pendidikan

anak usia dini itu sampai Rp.30.000.000.

Program-program yang dibuat oleh desa olele sudah berusaha mengakomodir kebutuhan kelembagaan masyarakat desa olele. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi seperti masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat dan kontribusi yang dapat diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga sulit untuk memperoleh partisipasi aktif dari mereka.

Keterbatasan Sumber Daya juga masih menjadi kenadala secara umum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masayarakatnya. Terbatasnya dana dan personel dapat membatasi kapasitas lembaga dalam menyelenggarakan pelatihan, mendapatkan bantuan teknis, atau mengelola program dengan efektif. Eksistensi dan Ketidakstabilan Internal juga adalah salah satu kendala yang masih sulit diatasi. Tidak jarang lembaga-lembaga di desa menghadapi resistensi internal terhadap perubahan atau perbaikan. Beberapa anggota lembaga mungkin tidak ingin mengubah cara kerja atau menghadapi tantangan baru. Selain itu, adanya ketidakstabilan internal dalam lembaga, seperti konflik kepentingan, perubahan kepemimpinan yang sering, atau ketidaktersediaan anggota lembaga yang konsisten, dapat menghambat kelancaran program bina kelembagaan.

Dalam menjalankan pemberdayaan dibidang ini juga tak luput dari hambatan maupun tantangan yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah desa olele. Hal ini sebagaimana yang menjadi temuan dalam hasil penelitian yaitu:

1. Ketidaksesuaian Struktur Kelembagaan: Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian struktur kelembagaan dengan tujuan dan kebutuhan program. Struktur kelembagaan yang tidak efisien atau tidak sesuai dengan konteks dan kompleksitas masalah yang dihadapi dapat menghambat pelaksanaan

program.

2. Kurangnya Komitmen dan Partisipasi Anggota: Keberhasilan program bina kelembagaan juga bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif anggota kelembagaan. Kurangnya komitmen dari anggota kelembagaan atau kurangnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat menghambat perubahan yang diinginkan.
3. Kurangnya Pendanaan yang Memadai: Program bina kelembagaan membutuhkan pendanaan yang memadai untuk melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, konsultasi, atau perubahan infrastruktur organisasi. Kurangnya pendanaan yang memadai dapat menjadi kendala dalam melaksanakan program dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan upaya dalam perbaikan agar semua program yang telah dicanangkan baik pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, pemberdayaan lingkungan maupun pemberdayaan kelembagaan bisa berjalan secara optimal dan tepat sasaran sebagai mana tujuan dari masing-masing program.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan pemberian kekuatan, peningkatan kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh komunitas mereka.

Dari hasil pengumpulan data dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Bina manusia merupakan program tahunan yang dilaksanakan dalam naungan bidang pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah desa olele telah melakukan survei dan analisis kebutuhan masyarakat agar program kegiatan yang dijalankan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga telah mengidentifikasi kendala-kendala dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya
2. Bina Usaha merupakan program-program yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat olele. Pemerintah desa telah menentukan Prioritas Kegiatan Bina Usaha serta dapat mengalokasikan dana secara efisien dan transparan. Rencana ini akan menjadi acuan dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan bina usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan usaha di desa. misalnya sebuah kebijakan pengembangan ekonomi lokal dengan pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di desa yang berpotensi signifikan untuk meningkatkan usaha warga.
3. Bina Lingkungan. Di Desa olele terdapat program-program yang berkaitan dengan perlindungan maupun pelestarian lingkungan. Meskipun banyak

hambatan dalam menjalankan program ini pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencanangkan program-program untuk pelestarian lingkungan dengan mengontrol dan mengevaluasi agar bisa melakukan Langkah-langkah perbaikan kedepannya.

4. Bina kelembagaan. Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya penting dalam menguatkan peran-peran masyarakat untuk mewujudkan program pemberdayaan dalam upaya mensejahteraakan masyarakat.

5.2 SARAN

Untuk memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Olele maka pemerintah desa perlu meningkatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa bisa melakukan survei dan analisis kebutuhan masyarakat sebelum melakukan kegiatan untuk menentukan program prioritas.
2. Pemerintah desa harus menggalakkan Pelatihan dan Pendidikan terkait lingkungan usaha perlu dilakukan kepada masyarakat desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa terkait pengelolaan lingkungan yang baik dan ramah lingkungan.
3. Lebih meningkatkan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R. (2006) Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Jakarta
- Akbar, M., Kai, A., Pemerintahan, I., Negeri, D., Raya, J., & Soekarno, I. (2021). *Bina Manusia dan Bina Usaha oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabuoaten Gorontalo pada Pengrajin Karawo Di Kecamatan Telaga Gorontalo.*
- Asyiroh, F. (2017). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semolowaru melalui Perpustakaan Kelurahan Semolowaru Surabaya. *Journal Unair*, 1–16.
- Baura, J., & Mandey. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat).*
- Fadlillah, P. A., & Kushandajani. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijakska Kabupaten Pati Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 181–190.
- Indriyanto, W. R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Percontohan (Studi Pada Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik). *Jurnal mahasiswa. Unesa*, 1–8.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). *Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development*. 6(1), 14–24.
- Mardikanto, T & Soebito, P. 2019. Pemberdayaan masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2012). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In *Universitas Indonesia_UI Press*.

- Moleong, Lexy J, 2012. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. (1996). Membahas pembangunan desa. Aditya Media, Yogyakarta
- Randy R Wrihantnolo & Riant Nugroho Dwijowijoto, (2006). Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Riniwati, H. (2011). Mendongkrak Motivasi dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM. Malang: UB Press
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sumaryo (2013). Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam pemberdayaan masyarakat. Disampaikan dalam pelatihan pengorganisasian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat, di IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
- Sumaryadi, I.N. (2005) Development Planning of Autonomous Region and Social Empowerment (Indonesia). Citra Utama, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Medika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Tehupuring, R., & Yunita, D. R. (2021). Utilization of Village Funds and Village Development Expenditures: The Role of Village Budget Stress as Moderator Variable. *Ijisrt.Com*, 6(10) <https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT21OCT328.pdf>
- Wahjudin Sumpeno. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua Read Indonesia, Jakarta
- Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat,

dan Utuh (Village Autonomy Is Original Autonomous, Spherical, and Integral). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara bersama kepala desa Olele



Gambar 1.2 Wawancara bersama kepala Kaur Perencanaan di Kantor Desa Olele



Gambar 1.3 Wawancara dengan Sekretaris Desa Olele



Gambar 1.4 Dokumentasi bersama Kepala Keuangan Kantor Desa Olele



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4503/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Olele

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Delia Kamba

NIM : E1121070

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO

Judul Penelitian : DAMPAK OPTIMALISASI DANA DESA BAGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PADA STUDI DESA
OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KECAMATAN KABILA BONE

DESA OLELE

Alamat ,Jl. Trans Sulawesi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/2003.08-03/088/IV/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Olele, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo :

Nama : Delia Kamba

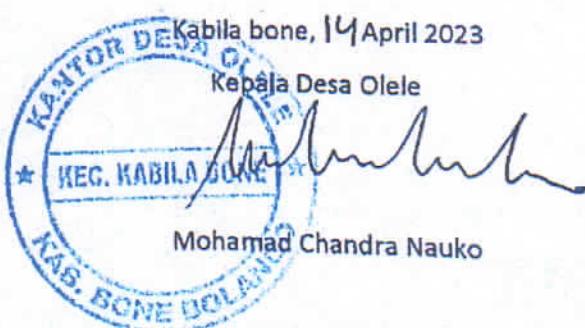
Nim : E1121070

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : S1 Akuntansi

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 10 – 15 Maret di Desa Olele Kecamatan Kabilia Bone untuk menyusun Skripsi dengan judul "DAMPAK OPTIMALISASI DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO) TAHUN 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat ,agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/0/2011 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT. DEKTI

JALAN : Actamad Nadjamudin No. 17 Tel/Fax. (0435) 829975 Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor:/SKBP/Pemus-FE/UTG/...../.....

Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Gorontalo. Menyatakan bahwa :

Nama	DEWA KAMBÀ
Nim	E1121070
Jurusan	S1 Akuntansi
Tempat, Tanggal Lahir	Molentabu, 21 Oktober 1990
Angkatan	2021
Np Tlp/Email	0821 0912 0467
Judul Skripsi	Dampak Optimalisasi Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat (studi pada Desa olele kabupaten Bone Bolango)

Tidak inempunyai tanggungan peminjaman sehingga mahasiswa tersebut di atas dinyatakan iku serta denda di perpustakaan ekonomi bas pustaka

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorongalo, 2

Kepala Perpustakaan



Perry-Chrisitian, SE, M.S.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 149/SRP/FE-UNISAN/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Delia Kamba
NIM : E1121070
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Dampak Optimalisasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Olele Kabupaten Bone Bolango)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Dekan,



DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 26 Mei 2023
Tim Verifikasi,



Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME
SKRIPSI DELIA KAMBA.docx

AUTHOR
Delia Kamba

WORD COUNT
14378 Words

CHARACTER COUNT
96610 Characters

PAGE COUNT
85 Pages

FILE SIZE
990.9KB

SUBMISSION DATE
May 23, 2023 2:31 PM GMT+7

REPORT DATE
May 23, 2023 2:33 PM GMT+7

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

ABSTRACT

DELIA KAMBA. E1121070. THE IMPACT OF OPTIMIZING VILLAGE FUNDS ON COMMUNITY EMPOWERMENT (A STUDY AT OLELE VILLAGE, BONE BOLANGO DISTRICT)

This study aims to find and analyze the impact of optimizing the use of village fund allocations for community empowerment in Olele Village, Kabilia Bone Subdistrict, and Bone Bolango District. The research method used in this study is descriptive using qualitative data types. The data collection is done through observation, interviews, and documentation. The data analysis is conducted by collecting all information, reducing data, validating data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the impact of optimizing village funds for community empowerment covers: (1) Human development is an annual program carried out under the auspices of the community development sector. For example, the activities of fostering women's organizations, namely, special activities for Family Welfare Empowerment which focus on fostering community members to be more empowered. (2) Business Development, which is a program aimed at helping the economy of the Olele community. For example, the community institutional development program, which includes providing inseminators or supervisors for cattle. (3) Environmental Development, in which in Olele Village, there are programs related to environmental protection and preservation, for example, introducing an integrated waste management system and greening the village with a tree planting program. (4) Institutional development in which in all villages, there are programs to increase the capacity of village officials. The programs need to be developed for improving the quality of services to the community. In addition, there are also management programs for MSME institutions, especially those whose products can be marketed outside the village, which need guidance on how to expand their marketing.

Keywords: village funds optimization, community empowerment

ABSTRAK

DELIA KAMBA. E1121070. DAMPAK OPTIMALISASI DANA DESA BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA DESA OLELE KABUPATEN BONE BOLANGO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak optimalisasi peggunaan alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat di desa Olele Kecematan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi, mereduksi data, keabshian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dampak optimalisasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh kesimpulan bahwa: (1) Bina manusia merupakan program tahunan yang dilaksanakan dalam naungan bidang pembinaan kemasyarakatan. Misalnya kegiatan pembinaan organisasi perempuan. yaitu kegiatan khusus untuk PKK yang fokus untuk membina anggota masyarakat untuk lebih berdaya.(2) Bina Usaha. Bina Usaha merupakan program-program yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat olele. misalnya program pembinaan kelembagaan masyarakat, ini termasuk menyediakan inseminator atau pengawas untuk ternak sapi. (3) Bina Lingkungan. Di Desa olele terdapat program-program yang berkaitan dengan perlindungan maupun pelestarian lingkungan. Misalnya seperti memperkenalkan sistem pengelolaan sampah terpadu, penghijauan desa dengan program penanaman pohon. (4) Bina kelembagaan. Di desa olele terdapat program-program untuk peningkatakan kapasitas aparatur desa. program ini menjadi hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ada juga program pengelolaan Lembaga-lembaga UMKM, khususnya yang produknya bisa dipasarkan hingga keluar desa ini butuh pembinaan, bagaimana bisa meluaskan pemasarannya.

Kata kunci: optimalisasi dana desa, pemberdayaan masyarakat

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Delia Kamba
Nama Panggilan : Adel
Nim : E1121070
Tempat Tanggal Lahir : Molotabu, 21 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2021 genap (Konversi)
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Desa Botutonuo, Kecamatan Kabilia Bone,
Kabupaten Bone Bolango
Email : deliakambaamd@gmail.com
No. Hp : 082189120467
Jumlah Saudara Kandung : 1 (Satu)

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 3 Molotabu Lulus Pada Tahun 2003
2. MTS Al-Khiraat Kota Gorontalo Lulus Pada Tahun 2005
3. SMA Negeri 2 Kota Gorontalo Lulus Pada Tahun 2009
4. Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ekonomi
Program Studi D3 Akuntansi Lulus Pada Tahun 2012
5. Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ekonomi
Program Studi S1 Akuntasni 2019-2023